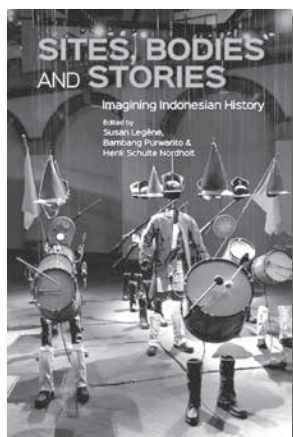


KAWISTARA

VOLUME 7

No. 2, 17 Agustus 2016

Halaman 113-224

**MENERA ULANG SEJARAH INDONESIA
LEWAT TIGA RANAH****Resensi****M Rizal Abdi***

Judul : Sites, Bodies, and Storie: Imagining Indonesian History
 Penyuting : Susan Legêne, Bambang Purwanto, dan Henk Schulte Nordholt
 Penulis : Marieke Bloembergen, Martjin Eickhoff, Emile Wellfelt, Willem Westerkamp, Fenneke Sysling, Matthew Isaac Cohen, Sadiah Boonstra, tular Sudarmadi, I Ngruh Suryawan, Sri Margana
 Penerbit : National University of Singapore (NUS) Press
 Jumlah : xiv + 245 Halaman
 ISBN : 978-9971-69-857-7

Perbincangan tentang diskursus sejarah pembentukan suatu bangsa, apalagi bangsa semajemuk Indonesia, selalu menarik untuk diikuti. Tidak hanya mampu mengusik narasi yang sudah mapan, pembahasan semacam ini kerap membuka celah kajian yang acap lolos dari jaring pengamatan para akademisi dan ilmuwan terdahulu. Bermula dari kegelisahan tentang penempatan koleksi tidak bertujuan di museum Tropen, buku *Sites, Bodies, and Stories* memancing ruang diskusi yang lebih luas dan pelik tentang bagaimana sejarah dari sebuah negara bermula dan intrik pergumulan wacana di dalamnya. Subjudul buku ini memberikan gelagat bahwa ia tengah mengadopsi pemikiran Ben Anderson dalam *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1991) tentang negara sebagai sebuah “Komunitas Terbayang.” Akan tetapi, buku ini melangkah lebih jauh dari tesis Anderson dengan merujuk lebih banyak dan beragam aktor. Tidak cuma dari elit patriotik negara, tetapi para seniman, akademisi, petugas museum, sampai turis pelancong juga ikut berperan

dalam pembentukan sebuah komunitas terbayang bernama Indonesia.

Pendekatan formasi *heritage* atau warisan pusaka sebagai pintu masuk, *Sites, Bodies, and Stories* berusaha menera ulang sejarah Indonesia melalui tiga ranah: situs, tubuh, dan cerita. Alih-alih menyajikan deskripsi siap pakai, buku ini justru mengajak pembaca untuk mempertanyakan lagi konsep di tiga ranah tersebut dengan memperluas kembali cakupan kajian di masing-masing ranah. Sebagai contoh, “situs” tidak sekadar dipahami sebagai lokasi fisik secara geografis, tetapi juga sebuah ruang ingatan tempat relasi antara yang lokal dan global tertambat. Pada konsep “tubuh” yang tidak cuma mengacu pada daging berbalut kulit, tetapi juga replikasi dan representasi darinya seperti manekin, diorama, peta, film, dan fotografi. Sebuah “cerita” tak lagi merujuk pada rentetan narasi tetapi juga khasanah seni pertunjukan dan warisan pusaka takbenda (*intangible heritage*) yang mengandung isu pelibatan dan penolakan narasi tertentu. Di sisi lain, perbincangan tentang warisan

*) Mahasiswa Pascasarjana CRCS UGM

pusaka suatu bangsa tidak dapat lepas dari tarik-menarik antara kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Pada konteks dekolonisasi, sembilan artikel yang terbagi dalam tiga bagian dalam buku ini merekonstruksi ketiga konsep situs, tubuh, dan cerita yang ternyata berkait kelindan dalam berbagai pendekatan interdisipiner.

Bagian pertama yang bertajuk "Sites" berisi dua artikel yang mengupas dinamika pembentukan status cagar budaya sebagai warisan pusaka di dua lokasi: Candi Borobudur di Muntilan, Jawa tengah dan Bampalola di Alor, Nusa Tenggara Timur. Terlepas dari lokasi geografis yang jauh terpisah, dua cagar budaya ini memiliki narasi yang berseberangan, tetapi sama-sama berperan penting dalam proses pembentukan identitas Indonesia di mata dunia. Bloembergen dan Eickhoff sebagai artikel pembuka, mereka melacak proses dekolonisasi Borobudur sehingga menjadi ikon Indonesia modern. Menarik di sini bahwa proses dekolonisasi ini hadir dalam bentuk ketakutan pemerintah kolonial akan kehilangan warisan pusaka. Dengan telaten, keduanya menggali kembali arsip-arsip restorasi Borobudur di Indonesia dan Jepang untuk mengupas lapis demi lapis proses dekolonisasi yang melibatkan empat pihak (Indonesia, Belanda, Jepang, dan UNESCO) dalam empat level keterikatan kolonial yang berlainan.

Sementara itu, dalam konstelasi yang berbeda, ketakutan akan kehilangan juga menjadi salah satu isu dalam artikel Emilie Wellfelts tentang dua rumah adat di Bampalola, yaitu Fet Laktuik dan Baloi Bang. Meskipun mendapatkan status *heritage* dalam konteks politik yang bertolak belakang, keduanya hadir sebagai upaya pelestarian budaya leluhur dalam bingkai politik warisan pusaka pemerintah pusat. Patut diketahui, konsep warisan pusaka yang diusung oleh kedua rumah adat ini berbeda dengan konsensus arsitektur *heritage* global. Unsur keaslian atau orisinalitas tidak bertumpu pada aspek fisik bangunan, tetapi pada aspek non-materi, seperti tradisi

oral masyarakat, yang terkait dengan rumah adat tersebut. Lebih lanjut, Wellfelts menggarisbawahi bahwa kontekstualisasi konsep *heritage* ini tak hanya melegitimasi rumah adat di Bampalola sebagai bagian diskursus warisan pusaka di tataran yang lebih luas, tetapi juga menegosiasikan identitas lokal masyarakat adat di tengah dunia yang kian mengglobal (hlm.83).

Isu tentang representasi menjadi pokok bahasan tiga artikel di bagian kedua yang bertajuk, "Stories". Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan besar dalam silang wacana kolonial dan pascakolonial tentang siapa yang hendak direpresentasikan melalui obyek-obyek warisan pusaka tersebut dengan melalui bahasan berbagai model representasi dan visualisasi masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Masyarakat koloni atau imajinasi si pemerintah koloni. Artikel di bagian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan medium yang berbeda. Artikel Westerkamp memulai perbincangan dengan menelisik keberadaan manekin masyarakat koloni dalam pameran dan ekshibisi di museum Belanda. Tidak sekadar menjadi media pengetahuan masyarakat Belanda terhadap koloni mereka, manekin-manekin tersebut juga menyingkap arogansi cara pandang pemerintah kolonial terhadap jajahannya. temuan Westerkamp ini diperkuat oleh tulisan Fenneke Sysling tentang topeng cetakan wajah masyarakat Nias di tahun 1920an. Lewat paparan detail cara antropolog fisik menghasilkan karya ilmiahnya, Fenneke secara kritis menunjukkan bahwa topeng yang dibuat atas nama *racial science* itu bias kepentingan kolonial dan tidak bebas nilai. Diskusi tentang bias representasi ini makin kaya dengan kehadiran artikel Cohen tentang film-film komersial bertema Jawa dan Bali pada tahun 1919 sampai 1954. Hampir semua film yang diproduksi untuk pasar internasional tersebut membingkai Bali dalam kacamata turis kolonial sebagai tempat eksotis yang kental dengan fantasi "ketimuran" ala Barat. Meskipun berangkat dari pendekatan medium yang berbeda,

ketiga artikel tersebut bahu-membahu mengungkap bagaimana Indonesia sebagai masyarakat koloni dikategorisasi, diobyektivitas, lantas ditampilkan sebagai yang “lain” sesuai imajinasi penguasa kolonial.

Bias representasi dan kepentingan ini rupanya masih langgeng terwariskan hingga masa Indonesia pasca-kolonial. Keempat artikel pada bagian ketiga yang bertajuk “Stories” bias tersebut memainkan peran penting dalam tarik ulur wacana *heritage* atau warisan pusaka antara lokal dan global di Indonesia sekarang ini. Dua artikel pertama tentang pertunjukan wayang Jawa dari Boonstra dan tradisi musik *foi*, seruling bambu dari Ngada, Flores oleh Sudarmadi menunjukkan tegang-kendur negosiasi pelestarian warisan budaya antara keinginan lokal dan rumusan formal *heritage* masyarakat internasional. Negosiasi ini tidak pelak memaksa para pelaku dan penikmat tradisi ini untuk terus-menerus merekonstruksi identitas budaya mereka agar tetap lestari. Berangkat dari status warisan kolonial yang bertolak belakang (wayang sebagai tradisi elit Jawa dan *foi* sebagai musikalitas eksotis masyarakat Flores), kedua tradisi ini berhadapan dengan isu serupa tentang pelestarian berbasis keautentikan ala dunia internasional *vis a vis* tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kontestasi ini pada akhirnya mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali untuk siapa sebenarnya konsep warisan pusaka itu dibuat.

Pertanyaan identitas ini semakin menguat pada pembahasan kedua artikel berikutnya di bagian empat. Dalam artikelnya, Suryawan memotret ketegangan narasi antara masyarakat lokal, yang diwakili kelompok musik dan tari bernama Mambesak di Papua Barat, dan pemerintah pusat. Eksistensi grup Mambesak yang menyanyikan lagu-lagu suku lokal Papua dianggap Pemerintah Pusat sebagai aksi separatisme yang perlu ditumpas. Naas, aksi revitalisasi budaya oleh masyarakat lokal ini berujung pada pembunuhan Arnold ap, pentolan grup musik tersebut.

Sementara itu, lewat penelusuran tradisi oral dan catatan sejarah Blambangan, Sri Margana mengungkap bagaimana dominasi dari luar telah membentuk imaji dan stigma tentang masyarakat Banyuwangi selama berabad-abad. Pada masa kolonial, setidaknya ada tiga stigma yang berasal dari Jawa, Cina, dan Bali terhadap masyarakat Banyuwangi yang ketiganya merujuk pada stereotip bahwa masyarakat Banyuwangi adalah pemberontak, tidak setia, dan tidak bersahabat. Pasca-kerusuhan politik 1966, pemerintah dan akademisi lokal berusaha melawan stigmatisasi yang berasal dari luar dan merekonstruksi identitasnya yang baru. Kedua artikel tersebut menggarisbawahi melalui cara yang berbeda pergulatan masyarakat lokal untuk membangun kembali identitas mereka di tengah kepungan narasi besar penguasa. Para pelaku tradisi di keempat studi kasus tersebut menggambarkan bahwa upaya menghadirkan kembali sebuah warisan pusaka ternyata tidak pernah berhenti pada sekadar menampilkan ulang. Seiring transformasi politik yang terjadi, mereka menginovasi tradisi sebagai upaya untuk terus terhubung dengan narasi masa lalu sekaligus bernegosiasi dengan narasi penguasa.

Isu tentang “self” dan “other”, diri dan liyan hampir menjadi bahasan yang terus, dan tentu saja tak terhindarkan untuk, diperbincangkan dalam setiap artikel. Akan tetapi, buku ini tidak terjebak pada pengulangan yang membosankan. Dengan narasi yang kaya detail, kesembilan artikel di buku ini cukup berhasil menggambarkan betapa luas dan kompleksnya spektrum warisan pusaka kolonial terhadap suatu bangsa. Kompleksitas ini dapat terlihat dari rentang waktu bahasan yang menjangkau masa kolonial hingga sekarang, ragam, dan luasan objek kajian yang tersebar dari pusat di Jawa hingga ke daerah batas luar Indonesia seperti Alor, Flores, Papua, dan Nias, maupun representasi masyarakat Indonesia di negara asal pemerintah kolonial. Akan tetapi, ini pula yang membuat kumpulan tulisan di buku ini tak sempat bercakap lebih dalam

tentang ketersambungan dan keberlanjutan tentang perenang dekolonialisasi dalam konteks Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Terlepas dari itu, ketiga editor buku ini menata, merangkai, dan membingkai dengan apik kesembilan artikel sehingga dengan gamblang pembaca bisa menarik benang merah upaya dekolonialisasi di tiap tulisan. Lebih lanjut, dari sana pula dapat dibaca bahwa proses pembentukan warisan pusaka ini adalah proses dinamis yang jauh dari

kata selesai. Pergeseran kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor lokal, regional, maupun global membuat kategorisasi ajeg tentang siapa koloni dan siapa pengoloni menjadi mustahil dilakukan. Di satu waktu, masyarakat koloni dapat berbalik menjadi pemerintah kolonial bagi masyarakat lainnya. Maka dari itu, buku ini dapat pula dibaca sebagai upaya menyuarakan suara yang lain dan terpinggirkan dari sebuah proses tidak berkesudahan bernama sejarah Indonesia.